



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Wali Kota Binjai.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2021 merupakan Tahun Pertama Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021- 2026. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan perkiraan realisasi capaian Tahun Berjalan (Tahun 2024). Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.



DAFTAR ISI

KATA PENGHATAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	
1.2	LANDASAN HUKUM	2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
2.2	ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	23
2.4.	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	27
2.5.	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	43
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	44
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	50
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V	PENUTUP	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Rancangan Renja-OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis OPD. Rancangan Renja-OPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan



tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (*outcome*), indikator kinerja kegiatan (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005–2025 (Lampiran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025



1.4 Sistematika dan Penulisan

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023 urusan lingkungan hidup Kota Binjai Melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 21.995.056.564 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Langusng (BL) sebesar Rp. 13.661.849.514 dan teralisasi Rp.12.391.383.0689
- b. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 8.333.207.050 dan teralisasi Rp.8.073.056.421

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2023) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2024. Pada waktu Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan. Tabel 2.1 Program/ Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2023 :



**Tabel 2.1 Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Binjai Tahun 2023**

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		11.210.976.828
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.073.485.825
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.532.765.825
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	540.720.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.930.279
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	14.954.364
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	91.625.016
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.112.462
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	24.040.800
	Fasilitasi Kunjungan TamU	4.225.637
	Penyelenggaraan rapat Koor dinasi dan Konsultasi SKPD	59.972.000



Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.473.120
	Pengadaan Mebel (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	35.471.160
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	38.001.960
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.502.604
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	3.940.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	401.060.986
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	114.501.118
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	323.585.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	229.560.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	29.040.000



Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	52.785.000
	Pemeliharaan/ Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	12.200.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUOP		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	670.611.716
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	385.479.660
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	285.132.056
ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		301.843.068
	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	208.000.920
	Pengelolaan Laboratorium Lingkugnan Hidup Kabupaten/ Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	208.000.920



Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	93.842.148
	Pemberian Inforamsi Peringatan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	93.842.148
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)		2.455.538.562
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.455.538.562
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	3.118.702.131
	Pengembangan Kapasitas Kelembangaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai)	59.914.740
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		131.302.331
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	131.302.331
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban iain lingkungan dan/atau Izin PPLH	131.302.331



PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		8.307.202.709
	Pengelolaan Sampah	8.307.202.709
	Penangan Sampah Dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah di TPA / TPST/ SPA kabupaten/ Kota	3.603.851.400
	Penyusunan Keibjakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1.653.887.454
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA / TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	3.049.463.855



Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)

Kode Rekening	Urusan / Bidangurusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH Kota Binjai) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Desember 2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	-	-	-	-	100%	-	-
2.05.2.05.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	100%	96,7%	0,96%	100%	196,7%	-



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

2.05.2.05.01 .01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	100%	-	100%	96,72%	0,967%	100%	196,72%	1,96%
2.05.2.05.01 .01.02.04	Koordiansi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terpenuhi	100%	-	100%	96,37%	0,963%	100%	196,37%	1,96%
2.05.2.05.01.01.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	--	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.05.2.05.01 .01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinereja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinereja SKPD yang terpenuhi	100%	99,98	-	-	-	-	-	-
2.05.2.05.01 .01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	99,90	-	-	-	-	-	-
2.05.2.05.01 .01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	99,98	-	-	-	-	-	-



2.05.2.05.01.01.06	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-
2.05.2.05.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang terpenuhi	100%	93,72	100%	100%	1%	100%	293,72%	2,93%
2.05.2.05.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	99,95%	0,99%	100%	299,97	2,99%
2.05.2.05.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	100%	99,97	100%	99,92%	0,99%	100%	299,89%	2,99%
2.05.2.05.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	100%	99,95	100%	99,72%	0,99%	100%	299.67%	2,99%
2.05.2.05.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang terpenuhi	100%	99,98	100%	99,37%	0,99%	100%	299,35%	2,99%



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

2.05.2.05.01 .01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	99,98	100%	99,90%	0,99%	100%	299,88%	2,99%
2.05 . 2.05.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	88,32%	0,88%	100%	188.32%	1,88%
2.05 . 2.05.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	93,72	100%	88,32%	0,88%	100%	282.04%	2,82%
2.05.2.05.01 .01 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	99,74%	0,99%	100%	199,74%	1,99%
2.05.2.05.01 .01. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	100%	99,59%	100%	99,42%	0,99%	100%	299,01%	2,99%



		terpenuhi								
2.05.2.05.01 .01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	100%	-	100%	100%	1%	100%	200%	2%
2.05.2.05.01 .01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	100%	-	100%	100%	1%	100%	200%	2%
2.05.2.05.01 .01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	100%	-	100%	99,93%	0,99%	100%	199,93%	1,99%
2.05 . 2.05.01.01 . 17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	-	100%	77,48%	0,77%	100%	177,48%	1,77%
2.05.2.05.01 .01.17.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	100%	91,30%	100%	77,48%	0,77%	100%	268,78	2,68%



	Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	hidup dilaksanakan terhadap media Tanah , air , udara, dan Laut yang terpenuhi								
2.05.2.05.01.01.18	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	-	100%	92,38%	0,92%	100%	192,38%	1,92%
2.05 . 2.05.01.01 . 18.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat yang terpenuhi	100%	-	100%	-	-	-	-	-
2.05 . 2.05.01.01 . 18.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terpenuhi	100%	-	100%	92,38%	0,92%	100%	192,38%	1,92%



2.05 . 2.05.01.01 . 20	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100%	-	100%	94,87%	0,94%	100%	194,87	1,94%
2.05. 2.05.01.01 . 20.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpenuhi	100%	91,26%	100%	94,87%	0,94%	100%	286,13%	2,86%
2.05 . 2.05.01.01 . 23	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	23,75%	0,23%	100%	123,75%	1,23%
2.05 . 2.05.01.01 . 23.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang terpenuhi	100%	98,48%	100%	98,68%	0,98%	100%	297.16%	2,97%
2.05 . 2.05.01.01 . 23.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	100%	92,61%	100%	-	-	100%	192,61%	1,97%



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

	yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi								
2.05 . 2.05.01.01 . 27	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	-	-	-	-	-
2.05 . 2.05.01.01 . 27.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terpenuhi	100%	-	100%	-	-	-	-	-
2.05 . 2.05.01.01 . 29	Pengelolaan Sampah									
2.05 . 2.05.01.01 . 29.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	100%	93,79%	100%	99,85%	0,99%	100%	293,64%	2,93%



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan yang terpenuhi								
2.05 . 2.05.01.01 . 29.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang terpenuhi	100%	98,73%	100%	99,14%	0,99%	100%	297,87%	2,97%
2.05 . 2.05.01.01 . 29.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang terpenuhi	100%	98,03%	100%	96,13%	0,96%	100%	294.16%	2,94%



2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai terlihat dalam tabel T-C.30 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2025
1	Tersedianya Dokumen RPPLH			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Indeks Kualitas Air			-	74	84.15	84.2	-	92,50	-	-
3	Indeks Kualitas Udara			-	82,9	84.15		-	85,84	-	-
4	Indeks Tutuupan Lahan			-	-	27,23	28,85	-	22,38	-	-
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			25	25	25	25	-	62,45	-	-
6	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)			0.0403	0.0403	0.0403	0.0403	0.0403	0.0403	0.0403	0.0403
7	Persentase Pengawasan dokumen AMDAL yang diterbitkan			34	30	30	30	36	38	-	-



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

8	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup			-	1	1	1	-	-	-	-
10	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan			1	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase Sampah yang tertangani			60	60	60	60	99%	98,5%	-	-
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk			68	100	100	100	40%	41%	-	-



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil Analisis Identifikasi permasalahan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

1. Hasil Telaahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Hasil telaahaan Renstra kementerian lingkungan hidup/Lembaga dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara;
3. Hasil Telaahan Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga di dasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun internal.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kurang optimal penanganan terhadap pengaduan sengketa lingkungan	Kurangnya Sumber daya manusia yang ahli dibidang hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak usaha di kota Binjai belum bisa diakomodir pengawasannya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia
2.	Indeks kualitas Air belum memiliki data acuan yang kongkrit sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi.	a. Belum memiliki acuan yang kongkrit dalam bentuk dokumen sistem standar pengujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi dan memiliki standar mutu pengujian	<ul style="list-style-type: none"> • Optimaliasi inventarisasi, sinkronisasi dan sumber daya serta penerapan di laboratorium yang sesuai dengan aturan sistem manajemen mutu.



3.	Indeks kualitas udara belum optimalisasi pengujian terhadap data pendukung	<p>a. Belum optimalnya komitmen antara konsistensi dan Anggaran tahap persiapan menuju laboratorium yang terakreditasi</p> <p>b. Perolehan data pendukung Indeks Kualitas Udara masih menggunakan data hasil kerjasama dengan UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>a. meningkatkan pengetahuan parameter kunci pengujian kualitas Air seperti BOD, COD, TSS, pH, DO, TDS, Fecal Coli, NO3-N menyesuaikan dengan standar pengujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan tervalidasi dan memiliki standar mutu pengujian.</p> <p>b. Optimalisasi bahan dan peralatan penunjang serta pengetahuan Analisa Uji Kualitas Udar.</p>
4.	Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki nilai indeks rendah dibanding target karena kota binjai tidak memiliki persentase tutupan lahan khusus hutan	Adanya perumusan/ perhitungan khusus terhadap wilayah yang memiliki tutupan lahan khusus hutan.
5.	Peningkatan Luasan dan Kualitas RTH	a. Keterbatasan lahan Ruang Terbuka Hijau	a. Dukungan Instansi Vertikal terhadap penyediaan dan



		<p>(RTH) Kota Binjai</p> <p>b. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat akan pentingnya RTH</p> <p>c. Keterbatasannya anggaran penanganan RTH secara Optimal</p>	<p>pembuatan khususnya sempadan sungai dalam hal ini PSDA provinsi Sumatera Utara</p> <p>b. Pertambahan penduduk Kota Binjai Setiap Tahunnya yang membutuhkan ruang terbuka sebagai area bermain dan berinteraksi.</p>
6	Kurangnya Pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan	Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang ada dikota binjai belum bisa terlaksana dengan baik dikarenakan minimnya SDM yang ada di Bidang Pandal dan tidak adanya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha / kegiatan tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal
7.	Terkendalanya program sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	Keterbatasan Anggaran dana Penyelenggaraan Kegiatan Adiwiyata	Pelaksanaan Proses belajar mengajar yang belum optimal dikarena masi masa pandemi Covid - 19
8.	Belum tersedianya lahan tempat Pembuangan Akhir	a. Bahwa lahan yang bukan milik pemko binjai	a. Lahan yang tersedia pinjam



9.	sampah (TPA) yang memadai. Volume sampah yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan	b. Rendahnya kepedulian masyarakat lingkungan	pakai dari lahan milik PTPN II. b. Belum seimbang Volume sampah dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan.
----	--	---	---

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Binjai dijabarkan melalui analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/Menlhk/Sekjen/Kum.I/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan
- b. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk uji kualitas air dan udara.
- c. Sarana dan Prasarana cukup memadai di Bidang Kebersihan dan Angkutan sudah memiliki sekitar 20 unit Truk Sampah 4 unit Pick Up Sampah dan 13 Unit becak sampah.
- d. Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai, diantaranya berupa sudah mengikuti Pelatihan/ diklat mengenai AMDAL
- e. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Laboratorium belum terregistrasi dan terakreditasi
- b. Profesionalisme SDM aparatur belum memadai
- c. Banyaknya permintaan pengangkutan sampah dan peningkatan PAD sehingga Armada yang tersedia kurang untuk melakukan pelayanan
- d. Masih Kurangnya teknologi dan fasilitas penunjang di Ruang Kerja Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan



- e. Tidak adanya anggaran sebagai upaya dalam Pengendalian Dampak Lingkungan dalam hal pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan, sengketa lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ada di Kota Binjai
- f. Jumlah Sumberdaya Manusia masih belum bisa mengakomodir pengawasan

3. Peluang (*Oppurtunity*)

- a. Tersedianya aparatur sesuai dengan kompetensinya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
- c. Meningkatnya jumlah pelaku usaha dan / atau kegiatan yang sadar dan tertib akan peraturan dan ketentuan mengenai lingkungan hidup yang berlaku
- d. Akan ada ketersediaannya sumber daya manusia dan berkompeten dan bisa mengakomodir dalam hal pengawasa
- e. Kota Binjai merupakan kota yang sedang berkembang sehingga akan banyak usaha dan / atau kegiatan yang akan taat terhadap peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan.

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Daerah (IKLH) menjadi Indikator Kinerja PADA rpjmd Kota Binjai terhadap data laboratorium terkait Indeks Kualitas Air dan Udara.
- b. Perlunya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Tuntutan dari Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha meliputi ; penerapan perizinan berusaha berbasis resiko melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*
- d. Adanya pelaku usaha dan/ atau kegiatan maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengikuti atauran – aturan mengenai lingkungan hidup yang telah ditetapkan.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, maka penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Renja 2025, disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Tabel T-C.31 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CAPAIAN PENTING
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH KOTA BINJAI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi Kinerja SKPD	1 LAPORAN	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi Kinerja SKPD	1 LAPORAN	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	8,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	8,500,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	525,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	525,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	1 Paket	60,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	1 Paket	60,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DLH KOTA BINJAI	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	30,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DLH KOTA BINJAI	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	30,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	15,000,000	



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket bahan Logistik yang disediakan	4 Paket	115,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket bahan Logistik yang disediakan	4 Paket	115,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	60,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	24,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	24,000,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	12,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	12,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										



	Pengadaan Mebel	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	110 Unit	110,000,000	Pengadaan Mebel	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	110 Unit	110,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 Unit	111,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 Unit	111,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	400,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	400,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	98,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	98,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	195,560,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	195,560,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	41 Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	41 Unit	60,000,000
Pemeliharaan Mebel	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Alat Angkuatan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinan	250 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Mebel	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Alat Angkuatan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinan	250 Unit	20,000,000



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	522,730,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	522,730,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	15,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	15,000,000	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA BINJAI				
	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota										



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (PROKLIM)	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (PROKLIM)	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	1 Tahun	345,220,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	1 Tahun	345,220,000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH KOTA BINJAI					DLH KOTA BINJAI				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)										
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH KOTA BINJAI	Luas RTH yang dikelola	Ha	4,247,489,750	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DLH KOTA BINJAI	Luas RTH yang dikelola	Ha	4,247,489,750	



		BINJAI				(RTH)	I				
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH KOTA BINJAI				
Penyimpanan Sementara Limbah B3											
	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Laporan	100,000,000	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Laporan	100,000,000	



5	PROGRAM PEMBINA DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PEMBINA DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH KOTA BINJAI				
Pembinaan dan Pegnawasan Terhadap Usaha dan / ata kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota											
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentauan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	5 Dokumen	180,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentauan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	5 Dokumen	180,000,000	



Pengembangan Kapasiatas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Rekomendasi dan / atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	4 Orang	60,000,000	Pengembangan Kapasiatas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Rekomendasi dan / atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	4 Orang	60,000,000	
Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (MONEV)	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan dari Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan , persetujuan lingkungan , surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	50,000,000	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (MONEV)	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Laporan dari Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan , persetujuan lingkungan , surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	50,000,000	



6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAT	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAT	DLH KOTA BINJAI			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
	Peningkatan Kapasitas dan Kompensasi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga Masyarakat	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	180,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompensasi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga Masyarakat	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	180,000,000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	60,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	60,000,000



	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha / Kegiatan yang terlibat	4 Orang	50,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha / Kegiatan yang terlibat	4 Orang	50,000,000	
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Partisipasi terhadap PPLH	entitas	205,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Partisipasi terhadap PPLH	entitas	205,000,000	



8	PROGRAM PENAGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PENAGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA BINJAI				
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota											
	Pengolahan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti/ di tangani	1 Dokumen	50,000,000	Pengolahan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti/ di tangani	1 Dokumen	50,000,000	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH KOTA BINJAI				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH KOTA BINJAI				
	Penangan Sampah dnegna melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah di TPA / TPST/ SPA kabupaten/ Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,Diangkut,Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	35000 Ton	6,682,481,948	Penangan Sampah dnegna melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan , pengolahan dan pemerosesan akhir sampah di TPA /	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,Diangkut,Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	35000 Ton	6,682,481,948	



						TPST/ SPA kabupaten/ Kota					
Penyusun Kebijakan kerjasama pengelolaan Persampahan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sapah di TPA/ TPS Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Doku men	1,000,000,00 0	Penyusun Kebijakan kerjasama pengelolaan Persampahan	DLH KOTA BINJAI	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sapah di TPA/ TPS Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Dokum en	1,000,00 0,000		
Penyediaan Saranan dan Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah sarana dan prasarana penaganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	24 Unit Mobil Sampah, 13 unit Becak Sampah, 2 unit pick up ,300 unit	4,602,200,00 0	Penyediaan Saranan dan Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	DLH KOTA BINJAI	Jumlah sarana dan prasarana penaganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	24 Unit Mobil Sampah, 13 unit Becak Sampah, 2 unit pick up ,300 unit Tong	4,602,20 0,000		



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

				Tong Sampah Plastik.					Sampah Plastik.		
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--



2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tidak mendapatkan usulan kegiatan dalam Musrenbang Tahun 2025. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2025, Belum ada Usulan Kegiatan dari Musrenbang tahun 2025.



BAB III **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai akan mendukung pelaksanaan misi nomor 2 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu :

Misi ke 2 : ***Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.***

Untuk mewujudkan Misi ke 2 tersebut di susunlah tujuan dan sasarannya yaitu:

Tujuan : Terwujudnya sarana dan prasarana (infrastruktur) yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Sasaran : Meningkatnya wawasan masyarakat akan lingkungan.

Tabel 3.2

Telaahan Visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi ke-2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan	Banyaknya Jumlah Timbulan Sampah yang semakin meningkat dan jangkauan wilayah yang luas tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengangkutan yang tersedia	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana	Pemanfaatan kembali sampah dengan program 3 R (Resuse, Reduce, Recycle)



berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2025 merupakan rangkuman langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor : P.16/ MENLHK/ SETJEN/ SET.1/ 8/ 2020. Agenda Pembangunan Nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 7 agenda pembanguan diatas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN): Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Sasaran Pembangunan Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK adalah Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diupayakan melalui peningkatan kualitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan indicator : 1). Luas Minimal Kawasan Berfungsi Lindung dari 55 Juta Hektar menjadi 65 Juta Hektar (2025) dan 2). Kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hectar menjadi 36, 0 Juta Hektara (2025)

2. Prioritas Nasional (PN): Mengembangkan Wilayah Untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin pemerataan

Sasaran Pembangunan dalam Prioritas Nasioanal (PN) yang terkait KLHK adalah menurunnya Kesenjangan natara wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kawasan Timur Indonesia (KTT) yaitun Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan tetap menjaga Menentukan pertumbuhan wilayah Jawa, Bali dan Sumatera

3. Prioritas Nasional (PN): Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualtias dan Berdaya Saing

Sasaran Pembangunan Dalam Pritoritas Nasional (PN) yang terkait KLHK mencakup:

- a. Terwujudnya Penentasan Kemiskinan dengan Indikator: Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, luas kawasan hutan yan



dilepaskan untuk Tora, Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kementerian Kehutanan.

- b. Meningkatnya Produktivitas dan daya saing SDM, dengan indicator yaitu: Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, peningkatan persentase lulusan pendidikan dan vokasi yang mendapat pekerjaan, peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, peningkatan indeks peneliti, jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan, jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.
4. Prioritas Nasional (PN): membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran pembangunan dalam pritoratan Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK adalah :

- a. Peningkatan Kualtais Lingkungan Hidup daengan indicator indeks kualitaslingkungan Hidup (IKLH), terdiri atas: 1. Indeks Kualitas udara (IKU) dari 84,1 Poin menjadi 84,5 Poin (2025), 2. Indeks Kulatitas Air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2025), 3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dari 58,5 mnejdi 60, 5 poin (2025), dan 4. Indeks Kualtias Tutupan Lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 Poin (2021)
 - b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alamlingkungan hidup dengan indicator yaitu: 1. Jumlah lokasi pemantauan kualtias lingkungan dari 1048 lokasi mejadi 1.141 lokasi (2025).2. Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2025).3. Luas area dengan nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value / HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2025).4. Luas kawasan Konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2025).5. Luas Kawasan konservasi perairan dari 22, 68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2025) dan Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar sertiap tahun dari semulaseluar 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2 % dari data tersebut;
3. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator, yaitu: 1. Jumlah sampah yang terkelola secara nasioanl dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2025), 2. Jumlah persentase penurunan sampah yang terbuang kelaut menjadi 60 persen dari baselin terebut (2025), 3. Jumlah Limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 Juta Ton (2025);
4. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: 1. Jmumlah terkontaminasi Limbah B3 yang dipublikasi dari 475,676 ton menjadi 1.200.000 ton (2025), 2. Jumlah kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2025), 3. Jumlah spesies TSL terncana punah ditingkatkan populasi dari 25 jenis, kemudia tetap menjadi 539,8 juta ton (2025).
5. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidp indikator yaitu: persentase pemegangna izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dari 30 % menajadi 70% (2025), jumlah kasus pidana perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2025), jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan acamandari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2025) dan jumlah daerah yang memiliki



- pencemaran pemanfaatan dan pengendalian sumber daya dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2025)
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1, 15% PDB sektor tersebut.
 - c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi: pembangunan rendah karbon, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, rendahnya karbon pesisir dan laut
- Secara Umum Permasalahan Lingkungan Hidup pada tahun 2020-2025 berdasarkan Renstra KLHK :

1. Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan;
 - a. IKLH nasional masih berdasarkan pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 Poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 Poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 Poin)
 - b. IKLH Provinsi yang masih berada pada predikat kurang baik (nilai IKLH 50-60 poin) adalah sebanyak 3 Provinsi dan predikat sangat kurang baik (nilai IKLH 40-50 Poin) sebanyak 2 provinsi berarti ada 5 provinsi yang mengidentifikasi beban pemanfaatan telah melampaui kemampuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan karenanya harus diprioritaskan untuk perbaikan pada masa mendatang.
 - c. Komponen pembentukan dari IKLH yakni indikator IKA, IKU dan IKTL melanjutkan permasalahan sebagai berikut:
 - Terkait dengan indeks kualitas air (IKA),
 - Hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dengan jumlah sampel perusahaan yang dipantau 2.045 perusahaan selama tahun 2018 s/d 2019, dan yang memenuhi baku mutu 1.708 perusahaan, sedangkan yang tidak memenuhi baku mutu 305 perusahaan
 - Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 537 titik pantau di 78 sungai di 34 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli dan total coliform, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran. Oleh karena itu, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 turun drastis dari predikat cukup baik (nilai IKA 72,77 poin) menjadi predikat kurang baik (Nilai IKA 52,62 poin)
 - Pencemaran limbah domestik diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Hasil survey BPS (2017) mencatat bahwa jumlah rumah tangga dengan cakupan sanitasi layak baru mencapai 67,8% pada tahun 2016, serta tidak merata proporsinya di setiap wilayah/provinsi
 - terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU),
 - Secara umum, capaian indikator IKU termasuk pada predikat sangat baik, hanya pada tahun 2016 (setelah terjadinya kebakaran hebat di beberapa wilayah/pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015)



peringkatnya sedikit menurun ke predikat baik untuk tahun 2015- 2019;

- Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta dari kebakaran hutan dan lahan.
- terkait dengan Indeks Tutupan Lahan (IKTL)
 - Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan hanya pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) selama periode 2015-2019
 - Sumber penyebab utamanya adalah masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya, terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km²
- d. Permasalahan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan yang diindikasikan oleh kondisi sebagai berikut
 - Data BPS (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 69% sampah pada area urban/perkotaan di Indonesia masih ditangani dengan cara ditimbun ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini berarti pola penanganan sampah yang berlangsung selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu “Kumpul - Angkut - Buang”;
 - Kondisi ini terkait pula dengan rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle;
 - Sekarang ini, permasalahan yang mendesak adalah berkenaan dengan pencemaran sungai, danau dan laut oleh sampah plastik, dimana komposisinya telah mencapai 17% dari timbulan sampah serta rata-rata timbulan sampah plastik telah mencapai 7,3 juta ton per tahun. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang belum membudaya untuk membawa kantong belanja dari rumah ketika hendak berbelanja;
 - Permasalahan lainnya adalah masih tingginya penggunaan merkuri dalam usaha penambangan emas skala kecil (PESK). Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa para penambang emas skala kecil untuk melakukan penghentian penggunaan Merkuri dan selanjutnya beralih ke penggunaan bahan



lain yang tidak membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat

- e. Salah satu permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Lima masalah utama yang akan muncul bilamana dunia tidak peduli dengan masalah pemanasan global yaitu: (1) ancaman kepunahan beberapa ekosistem khusus/endemik atau khas (2) meningkatkan kejadian cuaca ekstrem yang berisiko/berdampak besar terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset, dan ekosistem (3) sebaran dampak yang tidak merata karena adanya perbedaan tingkat kerentanan berbagai wilayah sehingga kesejangan kesejahteraan antar wilayah akan semakin besar, (4) dampak bencana iklim terhadap kerugian ekonomi semakin meningkat, dan (5) perubahan yang besar yang tiba-tiba dan sulit untuk pulih kembali, seperti disintegrasi Greenland dan hilangnya lapisan es Antartika
 - f. Saat ini, keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, mayoritasnya masih di dalam kawasan konservasi, dan ada juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL belum diinventarisasi dan diverifikasi dengan maksimal, sehingga belum diketahui yang mana saja yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Sekarang ini, Kawasan Konservasi masih mengalami tekanan oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penopang kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi.
2. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional
Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7% di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK, dimana selama ini masih didominasi oleh produksi sumber daya hutan berupa produksi kayu bulat, sementara dari dari produksi HHBK dan pemanfaatan dari jasa lingkungan serta circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah belum maksimal.
 3. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat
 - Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak
 - Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkaitan dan berkelanjutan sebelum tercapai dengan optimal



4. Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK
 - Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal;
 - Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum;
 - Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal;
 - Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima

Adapun rumusan sasaran untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK



Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra KLHK

Sasaran Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran air tanah dan air permukaan yang disebabkan aktivitas manusia dan industri 2. Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi 3. Keterbatasan penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan kota. 4. Sulitnya mempertahankan capaian penurunan emisi GRK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum memadai 3. Belum sinerginya program penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait. 4. Belum optimalnya pengawasan kegiatan dan usaha 5. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam implementasi aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 6. Akses terbatas ke data dan informasi yang relevan dengan perubahan iklim 7. Visi Pembangunan rendah karbon belum tersampaikan ke seluruh pemangku kepentingan sehingga belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi (termasuk UPT Laboratorium) 2. Adanya kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup 3. Sudah ada kerangka kerja dan panduan internasional untuk menghitung pengurangan emisi gas rumah kaca Telah diterbitkannya peraturan yang terkait dengan perubahan iklim.



		terimplementasikan secara menyeluruh	
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dnegna daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya data yang tersedia untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 2. Minimnya SDM yang memahami tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup <p>Minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara mikro (skala rumah tangga)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran 2. Sosialisasi terhadap masyarakat tidak efektif 	Tersedianya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Terjaganya keberadaan, fungsi dan berdistribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang kurang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degradasi sumber daya alam dikarenakan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan 2. Kewenangan sektoral untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kehutanan berada di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Adanya kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap lingkungan hidup



		instansi lain	
<p>Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta SDM LHK yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan 2. Minimnya Jumlah PPNS dan PPLHD dalam penegakan hukum lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah 2. Kurangnya koordinasi antar sektor 3. Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana instansi lingkungan hidup dalam penerapan hukum lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Isu lingkungan merupakan isu global Tersedia nya pelatihan dan bimtek peningkatan kapasitas PPLHD dan PPNS



Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2021–2026, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, Peran utama Kementerian Tahun 2021–2026 yang akan diusung adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi Hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies
3. Memelihara kualitas Lingkungan Hidup, Menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Sasaran Strategi ini pembangunan lingkungan hidup dan Kinerja tahun 2021–2026. Sasaran strategi pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat: dengan Indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari sebesar indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan: dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi DLH terhadap devisa dan PNBK, komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan Satwa liar) dan Ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk pembangunan berkelanjutan: dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.



Berdasarkan Visi dan misi kementerian Lingkungan Hidup adanya sinkronisasi dengan visi dan misi Provisinsi Sumatera Utara serta visi dan Misi Kota Binjai, yaitu pada Misi Ke 4 (empat) Kementerian Lingkungan Hidup **“Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan** sedang visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur ada pada misi ke 5 (lima) yaitu: “ Mewujudkan Sumatera Utara yang bermatahat dalam dalam lingkungan karena ekologiannya yang terjaga, alamnya yang bersih dan Indah, Penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab. Dan ada sinkronisasi juga dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang ke 2 (Dua): **Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berwawasan Lingkungan**, adanya upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana (Infrastruktur) dan Penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki dorongan terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaiantujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indicator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.



Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima Tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD serta menangani permasalahan strategis maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran DLH Kota Binjai. Dalam menentukan Tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh SDA dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DLH Kota Binjai dengan memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Misi Pada RPJMD	Tujuan pada RPJMD	Tujuan pada perangkat Daerah
Meningkatkan Infrastruktur pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang merata diseluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Sasaran pada RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkannya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
			Indeks Kualitas Udara	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	25,62	27,23	28,85	30,46	32,08
			Indikator Tujuan:					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)			59,86	60,30	60,73	61,17	61,60

Sumber: Surat Edaran Nomor : SE.4 / Menlhk/Setjen /KUM.1/4.2021



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Pendanaan

Berdasarkan analisis kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Total program yang direncanakan sebanyak 9 program yang dijabarkan kedalam 37 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4-1 berikut ini.



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dan a	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Kelu aran Sub Kegi atan	H as il K eg ia ta n				Tolo k Uku r	Ta rge t	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 1								29,496,681,698.00			30,971,515, 782,90		
2	1 1	0 1							11,004,290,000			11,554,504, 500		
2	1 1	0 1	2. 01						10,000,000			10,500,000		



2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi Kinerja SKPD	Tersedia laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja skpd dan laporan hasil koordin asi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi Kinerja SKPD 1	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10,500,000	
2	1	0	2.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,025,000,000		9,476,250,000



2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103 Orang/Bulan	8,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8,925,000,000
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	525,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	551,250,000
2	1	0	2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90,000,000			94,500,000



2	1	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Paket	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	63,000,000
2	1	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31,500,000
2	1	0	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					326,000,000		342,300,000



2	1	0	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompo nen Instalas i Listrik / Peneran gan Bangun an Kantor yang disedia kan	Tersedi anya kompo nen instala si listrik / penera ngan bangun an kantor	Semu a Kabup aten / Kota, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan	12 Pake t	15,000,000	Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um	15,750,000
2	1	0	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logisiti k yang disedia kan	Tersedi anya Bahan Logistik Kantor	Semu a Kabup aten / Kota, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan	4 Pake t	115,000,000	Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um	120,750,000



2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disedia- kan	Tersedi anya Barang cetak dan Penggandaan	Semu a Kabu paten / Kota, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan	4 Pake t	60,000,000	Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um	63,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang - undang an yang disedia kan	Tersedi anya bahan bacaan dan peratur an perund ang- undang an	Semu a Kabu paten / Kota, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan	12 Dok ume n	24,000,000	Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um	25,200,000



2	1	0	2.0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12,600,000
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105,000,000
2	1	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					221,000,000		232,050,000



2	1	0	2.0	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tersedia Mebel	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Unit		110,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	115,500,000
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Tersedia Pesralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Unit		111,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	116,550,000
2	1	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							504,000,000					529,200,000



2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaan Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6,300,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	420,000,000



2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	98,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	102,900,000
2	1	0	2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				828,290,000	869,704,500		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara ra dan dibayar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Unit	195,560,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	205,338,000



							kan Pajaknya	Operasi onal Lapangan										
2	1 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharaan dan dibayar kan pajak dan perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41 Unit		60,000,000					Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	63,000,000



2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Unit	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21,000,000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,750,000



2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	522,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	548,866,500
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhab	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,750,000



						ilitasi	Lainny a																										
2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDAL IAN PENCEMARA N DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGA N HIDUP													730,220,000.00															766,731,000
2	1 1	0 3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota													395,220,000														414,981,000	



2	1	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (PROKLIM)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (PROKLIM)	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52,500,000
---	---	---	-----	---	--	---	--	--	-----------	---------------	--------------------------------------	------------



2	1 1	0 3	2.0 1	0 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Terlaksananya pengambilan contoh uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	345,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	362,481,000
2	1 1	0 3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota					335,000,000		351,750,000
2	1 1	0 3	2.0 2	0 1	Pemberian Inforamsi Peringatan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Inforamsi Peringa	Terlaksananya sosialisasi informasi peringa	Semua Kabupaten / Kota, Semua	1 Laporan	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	89,250,000



				(IKPLHD)		tan Pencem aran dan / atau kerusak an lingkug nan hidup pada Masyar akat (IKPLH D)	tan pencem aran dan / atau keruas kan lingkun gan hidp pada masyar akat di Kabupa ten/ Kota	Keca mata n, Semu a Kelur ahan					Alok asi Um um			
2	1	0	2.0	0	Penghentian Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup (RUTIN)	Jumlah Sumber Pencem ar dan / atau kerusak an lingkun gan hidup yang dihenti kan	sumber pencem aran dan / ata kerusa kan lingkun gan hidup yang dihenti kan	Semu a Kabu paten / Kota, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan	5 Titik		250,000,000		Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um			262,500,000



2	1	0			PROGRAM PENGELOLA AN KEANEKARA GAMAN HAYATI (KEHATI)												4,247,489,750				4,459,864,2 38	
2	1	0	2.0		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																	
2	1	0	2.0	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang dikelola	Ruang Terbuk a Hijau Yang Dikelol a	Semu a Kabu paten / Kota, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan		Ha						4,247,489,750				Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um	4,459,864,23 8



2	1 1	0 5		PROGRAM PENGENDAL IAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						100,000,000					105,000,000
2	1 1	0 5	2.0 1	Penyimpanan Sementara Limbah B3						100,000,000					105,000,000



2	1	0	2.0	0	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	Dan Transfer Umum-Dan Alokasi Umum	105,000,000
---	---	---	-----	---	--	--	--	--	-----------	-------------	------------------------------------	-------------



2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													585,000,000						614,250,000		
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Peggawasan Terhadap Usaha dan / ata kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota															585,000,000						614,250,000
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Pemenuhan Ketentauan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan,	kegiatan Fasilita si Rekomendasi / atau pemenuhan ketentuan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semu			5 Dokumen							250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					262,500,000	



							dan surat kelayakan operasi yang diberikan	perseujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	a Kelurahan							
2	1	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah Rekomendasi dan / atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi	kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan / atau pemenuhan ketentuan perseujuan teknis, persetujuan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105,000,000



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

2	1	0	2.0	0	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (MONEV)	Jumlah Laporan dari Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan , persetujuan lingkungan , surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (MONEV)	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	235,000,000	Dan a Transfer Umum- Dan a Alokasi Umum	246,750,000
---	---	---	-----	---	---	--	--	--	--------------	-------------	---	-------------



2	1	0			PROGRAM PENINGKAT AN PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHA N LINGKUNGA N HIDUP UNTUK MASYARAT												290,000,000						304,500,000			
2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota															290,000,000						304,500,000
2	1	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas dan Kompensasi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkugan Hidup untuk lembaga Masyarat	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan	meningkatnya jumlah lembaga masyarakat/ kelompok masyarakat/ institusi skala Kabupaten/	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Lembaga							180,000,000	Dan a Transfer Umum- Dan a Alokasi Umum					189,000,000		



							kompetensinya terkait PPLH	Kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDMnya									
2	1	0	2.0	0	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,000,000



RENJA 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha / Kegiatan yang terlibat	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52,500,000
2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					205,000,000		215,250,000
2	1	0	2.0		Pemberian Penghargaan LingkunganHidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							



2	1 1	0 9	2.0 1	0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Partisipasi terhadap PPLH	Terlaksananya Penilaian Kinerja Partisipan dalam Rangka PPLH	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	entitas		205,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				215,250,000
2	1 1	1 0			PROGRAM PENAGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						50,000,000					52,500,000
2	1 1	1 0	2.0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota						50,000,000					52,500,000
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengolahan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /	Semua Kabupaten/ Kota, Semua	1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana				52,500,000



						ten / Kota yang ditindaklanjuti / ditangani	Kota yang dikelola	Kecamatan, Semua Kelurahan						Alokasi Umum				
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									12,284,681,948				12,898,916,045
2	1	1	2.01		Pengelolaan sampah									12,284,681,948				12,898,916,045
2	1	1	2.01	03	Penangan Sampah dnegna melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah di TPA / TPST/ SPA kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35000 Ton			6,682,481,948		Dan a Transfer Umum- Dan a Alokasi Umum			7,016,606,045



								Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
2	1	1	2.0	06	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Kerjasama Penangan Sampah di TPA/TPS Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Terlaksananya penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1,000,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,050,000,000



2	1	1	2.0	0	Penyediaan Saranan dan Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarna penaganaan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Tersedi sarana dan prasarna sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penangkutan, pengolahan, dan prosesan akhir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit Mobil Sampah, 13 unit Beca k Sampah, 2 unit pickup, 300 unit Tong Sampah Plastik.	4,602,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4,832,310,000
---	---	---	-----	---	--	--	---	--	---	---------------	--------------------------------------	---------------

Binjai, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI

AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA
NIP. 197601292006041005



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021-2026. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kota Binjai, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2025 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Tahun berjalan (Tahun 2024).

Dengan tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Binjai Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintahan Kota Binjai. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yaitu “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat” serta sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam rangka Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Binjai, 2025
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**

AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA
Nip.197601292006041005